

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Rokhmad, *Hukum Progresif: Pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Teori Masalah*, Program Pascasarjana IAIN Walisongo, Semarang, 2012.
- Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2011.
- Adnan buyung nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1981.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'aat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011.
- H.L.A Hart, *Konsep Hukum (The Concept of Law)*, Terj. M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2018.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Terj. Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2018.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yokyakarta: Mirra Buana, 2020.
- Ismet Sulila, *Implementasi Dimensi Layanan Publik dalam Konteks Otonomi daerah*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Jimly Ashiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Kementerian Hukum dan HAM, *et al, Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah*, Jakarta, 2018.

Komnas HAM RI, *Kajian Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Kelompok Rentan di Indonesia*, Jakarta: Komnas HAM RI, 2020.

Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Publik: Perihal Negara, Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan*, Setara Press, Malang, 2017.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Nukila Evanty dan Nurul Ghufron, *Paham Peraturan Daerah (Perda) Berspektif HAM (Hak Asasi Manusia)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, 2020.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Depok, 2019.

Jurnal

Evi Risnawati, *et al.*, *Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah*, Halu Oleo Legal Research, Volume 3 Issue 1, April 2021.

Hakki Fajriando, *Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal HAM, Volume 7, Nomor 2, Desember 2016.

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009.

Wiwik Afifah, *Bantuan Hukum Kelompok Rentan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 16, Nomor 1, Februari 2020-Juli 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 18 tahun 2013 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin

Peraturan Daerah Kota Makassar No. 7 Tahun 2015. Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin

Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Soppeng No. 1 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Perda no. 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Peraturan Daerah Kabupaten Bone No.5 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng No. 7 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Peraturan Daerah Kota Parepare No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Sumber Lainnya

Bank Dunia (*World Bank*), *COVID-19 to Add as Many as 150 Million Extreme Poor by 2021*, diakses pada [worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021](https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021), 2021.

BPS, *Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2022*, No. 51/06/Th.XXV, 15 Juli 2022.

BPS Provinsi Sulawesi Selatan, *Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan Sulawesi Selatan Maret 2022*, No. 36/7/73/Th.XVI, 15 Juli 2022.

Nabila, *et al.*, *Laporan Studi: Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2021.

Paul Prettitore, *Poverty and Legal Problems in Jordan: Defining the Relationship*,
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22734>, 2015,
diakses pada 24 Juni 2021.

LAMPIRAN

INVENTARISASI PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG BANTUAN HUKUM

NO.	PROVINSI	PERDA BANKUM	PERGUB BANKUM
1	Kalimantan Barat	√	
2	Bengkulu		
3	DI Yogyakarta		
4	Lampung	√	√
5	Nusa Tenggara Timur		
6	Papua Barat		
7	Sumatera Utara	√	
8	Maluku Utara		
9	Sulawesi Selatan		
10	Kep. Bangka Belitung	√	√
11	Jawa Timur	√	√
12	Kalimantan Selatan	√	√
13	Kalimantan Timur	√	
14	Kalimantan Utara		
15	Kepulauan Riau	√	√
16	Papua		
17	Sulawesi Tenggara	√	
18	Sulawesi Utara	√	
19	Sumatera Selatan	√	
20	DKI Jakarta		

NO.	PROVINSI	PERDA BANKUM	PERGUB BANKUM
21	Kalimantan Tengah		
22	Jawa Barat	√	√
23	Bali	√	
24	Jawa Tengah	√	√
25	Sumatera Barat	√	√
26	Nusa Tenggara Barat		
27	Sulawesi Barat		
28	Jambi		
29	Aceh	√	√
30	Banten	√	√
31	Gorontalo	√	√
32	Maluku	√	√
33	Riau	√	√
34	Sulawesi Tengah	√	
	Total	21	13

**INVENTARISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TENTANG BANTUAN HUKUM**

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
1	Kalimantan Barat	1	Sambas	√	√
	Kalimantan Barat	2	Bengkayang	√	
	Kalimantan Barat	3	Landak	√	
	Kalimantan Barat	4	Mempawah		
	Kalimantan Barat	5	Sanggau	√	
	Kalimantan Barat	6	Ketapang	√	
	Kalimantan Barat	7	Sintang		
	Kalimantan Barat	8	Kapuas Hulu		
	Kalimantan Barat	9	Sekadau		
	Kalimantan Barat	10	Melawi		
	Kalimantan Barat	11	Kayong Utara	√	
	Kalimantan Barat	12	Kubu Raya	√	
	Kalimantan Barat	13	Kota Pontianak		
	Kalimantan Barat	14	Kota Singkawang	√	√
2	Bengkulu	1	Bengkulu Selatan	√	
	Bengkulu	2	Rejang Lebong	√	√
	Bengkulu	3	Bengkulu Utara		
	Bengkulu	4	Kaur		
	Bengkulu	5	Seluma		

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
	Bengkulu	6	Mukomuko	√	
	Bengkulu	7	Lebong	√	
	Bengkulu	8	Kepahiang		
	Bengkulu	9	Bengkulu Tengah	√	
	Bengkulu	10	Kota Bengkulu	√	
3	Daerah Istimewa Yogyakarta	1	Kulon Progo		
	Daerah Istimewa Yogyakarta	2	Bantul	√	√
	Daerah Istimewa Yogyakarta	3	Gunung Kidul	√	
	Daerah Istimewa Yogyakarta	4	Sleman	√	
	Daerah Istimewa Yogyakarta	5	Kota Yogyakarta	√	√
4	Lampung	1	Lampung Barat	√	
	Lampung	2	Tanggamus		
	Lampung	3	Lampung Selatan		
	Lampung	4	Lampung Timur	√	
	Lampung	5	Lampung Tengah		
	Lampung	6	Lampung Utara	√	√
	Lampung	7	Way Kanan	√	
	Lampung	8	Tulangbawang	√	
	Lampung	9	Pesawaran		
	Lampung	10	Pringsewu	√	

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
	Lampung	11	Mesuji		
	Lampung	12	Tulang Bawang Barat		
	Lampung	13	Pesisir Barat		
	Lampung	14	Kota Bandar Lampung	√	
	Lampung	15	Kota Metro	√	
5	Nusa Tenggara Timur	1	Sumba Barat		
	Nusa Tenggara Timur	2	Sumba Timur		
	Nusa Tenggara Timur	3	Kupang		
	Nusa Tenggara Timur	4	Timor Tengah Selatan		
	Nusa Tenggara Timur	5	Timor Tengah Utara		
	Nusa Tenggara Timur	6	Belu		
	Nusa Tenggara Timur	7	Alor		
	Nusa Tenggara Timur	8	Lembata		
	Nusa Tenggara Timur	9	Flores Timur		
	Nusa Tenggara Timur	10	Sikka		
	Nusa Tenggara Timur	11	Ende		
	Nusa Tenggara Timur	12	Ngada	√	
	Nusa Tenggara Timur	13	Manggarai		
	Nusa Tenggara Timur	14	Rote Ndao		
	Nusa Tenggara Timur	15	Manggarai Barat	√	

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
	Nusa Tenggara Timur	16	Sumba Tengah		
	Nusa Tenggara Timur	17	Sumba Barat Daya		
	Nusa Tenggara Timur	18	Nagekeo		
	Nusa Tenggara Timur	19	Manggarai Timur		
	Nusa Tenggara Timur	20	Sabu Raijua		
	Nusa Tenggara Timur	21	Malaka		
	Nusa Tenggara Timur	22	Kota Kupang		
6	Papua Barat	1	Fakfak		
	Papua Barat	2	Kaimana		
	Papua Barat	3	Teluk Wondama	√	
	Papua Barat	4	Teluk Bintuni		
	Papua Barat	5	Manokwari		
	Papua Barat	6	Sorong Selatan		
	Papua Barat	7	Sorong		
	Papua Barat	8	Raja Ampat		
	Papua Barat	9	Tambrau		
	Papua Barat	10	Maybrat		
	Papua Barat	11	Manokwari Selatan		
	Papua Barat	12	Pegunungan Arfak		
	Papua Barat	13	Kota Sorong	√	

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
7	Sumatera Utara	1	Kota Tanjungbalai	√	√
	Sumatera Utara	2	Kabupaten Asahan	√	√
	Sumatera Utara	3	Kabupaten Toba (d.h. Toba Samosir)	√	
	Sumatera Utara	4	Kabupaten Batubara		
	Sumatera Utara	5	Kabupaten Dairi		
	Sumatera Utara	6	Kabupaten Deli Serdang		
	Sumatera Utara	7	Kabupaten Humbang Hasundutan		
	Sumatera Utara	8	Kabupaten Karo		
	Sumatera Utara	9	Kabupaten Labuhan Batu Utara		
	Sumatera Utara	10	Kabupaten Labuhan Batu		
	Sumatera Utara	11	Kabupaten Labuhan Batu Selatan		
	Sumatera Utara	12	Kabupaten Langkat		
	Sumatera Utara	13	Kabupaten Mandailing Natal		
	Sumatera Utara	14	Kabupaten Nias		
	Sumatera Utara	15	Kabupaten Nias Barat		
	Sumatera Utara	16	Kabupaten Nias Selatan		

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
	Sumatera Utara	17	Kabupaten Nias Utara		
	Sumatera Utara	18	Kabupaten Padang Lawas		
	Sumatera Utara	19	Kabupaten Padang Lawas Utara		
	Sumatera Utara	20	Kabupaten Pakpak Bharat		
	Sumatera Utara	21	Kabupaten Samosir		
	Sumatera Utara	22	Kabupaten Serdang Bedagai		
	Sumatera Utara	23	Kabupaten Simalungun		
	Sumatera Utara	24	Kabupaten Tapanuli Utara		
	Sumatera Utara	25	Kabupaten Tapanuli Selatan		
	Sumatera Utara	26	Kabupaten Tapanuli Tengah		
	Sumatera Utara	27	Kota Medan		
	Sumatera Utara	28	Kota Binjai		
	Sumatera Utara	29	Kota Pematang Siantar		
	Sumatera Utara	30	Kota Padang Sidempuan		
	Sumatera Utara	31	Kota Sibolga		

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
	Sumatera Utara	32	Kota Gunung Sitoli		
	Sumatera Utara	33	Kota Tebing Tinggi		
8	Maluku Utara	1	Halmahera Barat		
	Maluku Utara	2	Halmahera Tengah	√	
	Maluku Utara	3	Kepulauan Sula		
	Maluku Utara	4	Halmahera Selatan		
	Maluku Utara	5	Halmahera Utara		
	Maluku Utara	6	Halmahera Timur		
	Maluku Utara	7	Pulau Morotai		
	Maluku Utara	8	Pulau Taliabu		
	Maluku Utara	9	Kota Ternate	√	√
	Maluku Utara	10	Kota Tidore Kepulauan	√	
9	Sulawesi Selatan	1	Kepulauan Selayar		
	Sulawesi Selatan	2	Bulukumba		
	Sulawesi Selatan	3	Bantaeng	√	√
	Sulawesi Selatan	4	Jeneponto	√	√
	Sulawesi Selatan	5	Takalar	√	
	Sulawesi Selatan	6	Gowa		
	Sulawesi Selatan	7	Sinjai	√	√
	Sulawesi Selatan	8	Maros	√	√

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
	Sulawesi Selatan	9	Pangkajene Dan Kepulaua		
	Sulawesi Selatan	10	Barru		
	Sulawesi Selatan	11	Bone	√	
	Sulawesi Selatan	12	Soppeng	√	√
	Sulawesi Selatan	13	Wajo	√	
	Sulawesi Selatan	14	Sidenreng Rappang		
	Sulawesi Selatan	15	Pinrang		
	Sulawesi Selatan	16	Enrekang		
	Sulawesi Selatan	17	Luwu		
	Sulawesi Selatan	18	Tana Toraja		
	Sulawesi Selatan	19	Luwu Utara		
	Sulawesi Selatan	20	Luwu Timur		
	Sulawesi Selatan	21	Toraja Utara		
	Sulawesi Selatan	22	Kota Makassar	√	
	Sulawesi Selatan	23	Kota Parepare	√	
	Sulawesi Selatan	24	Kota Palopo		
10	Kepulauan Bangka Belitung	1	Bangka		
	Kepulauan Bangka Belitung	2	Belitung	√	√
	Kepulauan Bangka Belitung	3	Bangka Barat	√	√
	Kepulauan Bangka Belitung	4	Bangka Tengah		

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
	Kepulauan Bangka Belitung	5	Bangka Selatan	√	√
	Kepulauan Bangka Belitung	6	Belitung Timur	√	
	Kepulauan Bangka Belitung	7	Kota Pangkal Pinang		
11	Jawa Timur	1	Pacitan		
	Jawa Timur	2	Ponorogo		
	Jawa Timur	3	Trenggalek	√	√
	Jawa Timur	4	Tulungagung	√	√
	Jawa Timur	5	Blitar	√	
	Jawa Timur	6	Kediri		
	Jawa Timur	7	Malang	√	
	Jawa Timur	8	Lumajang	√	
	Jawa Timur	9	Jember	√	
	Jawa Timur	10	Banyuwangi	√	
	Jawa Timur	11	Bondowoso		
	Jawa Timur	12	Situbondo	√	
	Jawa Timur	13	Probolinggo		
	Jawa Timur	14	Pasuruan		
	Jawa Timur	15	Sidoarjo		
	Jawa Timur	16	Mojokerto		
	Jawa Timur	17	Jombang	√	√

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
	Jawa Timur	18	Nganjuk		
	Jawa Timur	19	Madiun	√	√
	Jawa Timur	20	Magetan		
	Jawa Timur	21	Ngawi	√	
	Jawa Timur	22	Bojonegoro		
	Jawa Timur	23	Tuban	√	
	Jawa Timur	24	Lamongan		
	Jawa Timur	25	Gresik	√	
	Jawa Timur	26	Bangkalan	√	
	Jawa Timur	27	Sampang	√	
	Jawa Timur	28	Pamekasan	√	
	Jawa Timur	29	Sumenep		
	Jawa Timur	30	Kota Kediri	√	
	Jawa Timur	31	Kota Blitar		
	Jawa Timur	32	Kota Malang		
	Jawa Timur	33	Kota Probolinggo		
	Jawa Timur	34	Kota Pasuruan		
	Jawa Timur	35	Kota Mojokerto	√	√
	Jawa Timur	36	Kota Madiun	√	√
	Jawa Timur	37	Kota Surabaya	√	

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
	Jawa Timur	38	Kota Batu	√	√
12	Kalimantan Selatan	1	Tanah Laut		
	Kalimantan Selatan	2	Kota Baru		
	Kalimantan Selatan	3	Banjar	√	√
	Kalimantan Selatan	4	Barito Kuala		
	Kalimantan Selatan	5	Tapin		
	Kalimantan Selatan	6	Hulu Sungai Selatan	√	√
	Kalimantan Selatan	7	Hulu Sungai Tengah		
	Kalimantan Selatan	8	Hulu Sungai Utara	√	
	Kalimantan Selatan	9	Tabalong		
	Kalimantan Selatan	10	Tanah Bumbu	√	√
	Kalimantan Selatan	11	Balangan		
	Kalimantan Selatan	12	Kota Banjarmasin	√	√
	Kalimantan Selatan	13	Kota Banjar Baru	√	√
13	Kalimantan Timur	1	Paser		
	Kalimantan Timur	2	Kutai Barat		
	Kalimantan Timur	3	Kutai Kartanegara	√	
	Kalimantan Timur	4	Kutai Timur	√	
	Kalimantan Timur	5	Berau	√	√
	Kalimantan Timur	6	Penajam Paser Utara	√	

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
	Kalimantan Timur	7	Mahakam Hulu		
	Kalimantan Timur	8	Kota Balikpapan		
	Kalimantan Timur	9	Kota Samarinda	√	
	Kalimantan Timur	10	Kota Bontang	√	
14	Kalimantan Utara	1	Malinau	√	
	Kalimantan Utara	2	Bulungan		
	Kalimantan Utara	3	Tana Tidung		
	Kalimantan Utara	4	Nunukan		
	Kalimantan Utara	5	Kota Tarakan		
15	Kepulauan Riau	1	Karimun		
	Kepulauan Riau	2	Bintan		
	Kepulauan Riau	3	Natuna	√	
	Kepulauan Riau	4	Lingga	√	√
	Kepulauan Riau	5	Kepulauan Anambas	√	√
	Kepulauan Riau	6	Kota Batam		
	Kepulauan Riau	7	Kota Tanjung Pinang		
16	Papua	1	Merauke		
	Papua	2	Jayawijaya		
	Papua	3	Jayapura		
	Papua	4	Nabire		

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
	Papua	5	Kepulauan Yapen		
	Papua	6	Biak Numfor		
	Papua	7	Paniai		
	Papua	8	Puncak Jaya		
	Papua	9	Mimika		
	Papua	10	Boven Digoel		
	Papua	11	Mappi		
	Papua	12	Asmat		
	Papua	13	Yahukimo		
	Papua	14	Pegunungan Bintang		
	Papua	15	Tolikara		
	Papua	16	Sarmi		
	Papua	17	Keerom		
	Papua	18	Waropen		
	Papua	19	Supiori		
	Papua	20	Mamberamo Raya		
	Papua	21	Nduga *		
	Papua	22	Lanny Jaya		
	Papua	23	Mamberamo Tengah		
	Papua	24	Yalimo		

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
	Papua	25	Puncak		
	Papua	26	Dogiyai		
	Papua	27	Intan Jaya		
	Papua	28	Deiyai		
	Papua	29	Kota Jayapura		
17	Sulawesi Tenggara	1	Buton	√	
	Sulawesi Tenggara	2	Muna		
	Sulawesi Tenggara	3	Konawe	√	
	Sulawesi Tenggara	4	Kolaka	√	
	Sulawesi Tenggara	5	Konawe Selatan	√	√
	Sulawesi Tenggara	6	Bombana	√	
	Sulawesi Tenggara	7	Wakatobi		
	Sulawesi Tenggara	8	Kolaka Utara		
	Sulawesi Tenggara	9	Buton Utara	√	
	Sulawesi Tenggara	10	Konawe Utara		
	Sulawesi Tenggara	11	Kolaka Timur		
	Sulawesi Tenggara	12	Konawe Kepulauan		
	Sulawesi Tenggara	13	Muna Barat	√	
	Sulawesi Tenggara	14	Buton Tengah		
	Sulawesi Tenggara	15	Buton Selatan		

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
	Sulawesi Tenggara	16	Kota Kendari		
	Sulawesi Tenggara	17	Kota Baubau		
18	Sulawesi Utara	1	Bolaang Mongondow	√	
	Sulawesi Utara	2	Minahasa		
	Sulawesi Utara	3	Kepulauan Sangihe		
	Sulawesi Utara	4	Kepulauan Talaud		
	Sulawesi Utara	5	Minahasa Selatan		
	Sulawesi Utara	6	Minahasa Utara		
	Sulawesi Utara	7	Bolaang Mongondow Utara		
	Sulawesi Utara	8	Siau Tagulandang Biaro		
	Sulawesi Utara	9	Minahasa Tenggara		
	Sulawesi Utara	10	Bolaang Mongondow Selatan		
	Sulawesi Utara	11	Bolaang Mongondow Timur		
	Sulawesi Utara	12	Kota Manado		
	Sulawesi Utara	13	Kota Bitung		
	Sulawesi Utara	14	Kota Tomohon		
	Sulawesi Utara	15	Kota Kotamobagu	√	
19	Sumatera Selatan	1	Ogan Komering Ulu	√	√

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
	Sumatera Selatan	2	Ogan Komering Ilir	√	
	Sumatera Selatan	3	Muara Enim	√	√
	Sumatera Selatan	4	Lahat	√	
	Sumatera Selatan	5	Musi Rawas	√	√
	Sumatera Selatan	6	Musi Banyuasin	√	√
	Sumatera Selatan	7	Banyu Asin		
	Sumatera Selatan	8	Ogan Komering Ulu Selatan	√	
	Sumatera Selatan	9	Ogan Komering Ulu Timur	√	
	Sumatera Selatan	10	Ogan Ilir	√	
	Sumatera Selatan	11	Empat Lawang	√	√
	Sumatera Selatan	12	Penukal Abab Lematang Ilir		
	Sumatera Selatan	13	Musi Rawas Utara	√	
	Sumatera Selatan	14	Kota Palembang	√	√
	Sumatera Selatan	15	Kota Prabumulih	√	
	Sumatera Selatan	16	Kota Pagar Alam	√	
	Sumatera Selatan	17	Kota Lubuklinggau	√	
20	DKI Jakarta	1	Kepulauan Seribu		
	DKI Jakarta	2	Kota Jakarta Selatan		
	DKI Jakarta	3	Kota Jakarta Timur		

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
	DKI Jakarta	4	Kota Jakarta Pusat		
	DKI Jakarta	5	Kota Jakarta Barat		
	DKI Jakarta	6	Kota Jakarta Utara		
21	Kalimantan Tengah	1	Kotawaringin Barat		
	Kalimantan Tengah	2	Kotawaringin Timur	√	√
	Kalimantan Tengah	3	Kapuas		
	Kalimantan Tengah	4	Barito Selatan	√	√
	Kalimantan Tengah	5	Barito Utara		
	Kalimantan Tengah	6	Sukamara	√	
	Kalimantan Tengah	7	Lamandau	√	√
	Kalimantan Tengah	8	Seruyan		
	Kalimantan Tengah	9	Katingan		
	Kalimantan Tengah	10	Pulang Pisau		
	Kalimantan Tengah	11	Gunung Mas		
	Kalimantan Tengah	12	Barito Timur		
	Kalimantan Tengah	13	Murung Raya		
	Kalimantan Tengah	14	Kota Palangka Raya	√	
22	Jawa Barat	1	Bogor	√	
	Jawa Barat	2	Sukabumi	√	√
	Jawa Barat	3	Cianjur	√	

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
	Jawa Barat	4	Bandung		
	Jawa Barat	5	Garut		
	Jawa Barat	6	Tasikmalaya	√	√
	Jawa Barat	7	Ciamis	√	
	Jawa Barat	8	Kuningan		
	Jawa Barat	9	Cirebon		
	Jawa Barat	10	Majalengka		
	Jawa Barat	11	Sumedang	√	√
	Jawa Barat	12	Indramayu	√	√
	Jawa Barat	13	Subang		
	Jawa Barat	14	Purwakarta	√	
	Jawa Barat	15	Karawang	√	√
	Jawa Barat	16	Bekasi	√	√
	Jawa Barat	17	Bandung Barat		
	Jawa Barat	18	Pangandaran		
	Jawa Barat	19	Kota Bogor	√	√
	Jawa Barat	20	Kota Sukabumi		
	Jawa Barat	21	Kota Bandung		
	Jawa Barat	22	Kota Cirebon	√	
	Jawa Barat	23	Kota Bekasi	√	

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
	Jawa Barat	24	Kota Depok	√	√
	Jawa Barat	25	Kota Cimahi	√	
	Jawa Barat	26	Kota Tasikmalaya	√	√
	Jawa Barat	27	Kota Banjar		
23	Bali	1	Kabupaten Jembrana		
	Bali	2	Kabupaten Tabanan	√	√
	Bali	3	Kabupaten Badung		
	Bali	4	Kabupaten Gianyar		
	Bali	5	Kabupaten Klungkung		
	Bali	6	Kabupaten Bangli		
	Bali	7	Kabupaten Karang Asem	√	
	Bali	8	Kabupaten Buleleng		
	Bali	9	Kota Denpasar	√	
24	Jawa Tengah	1	Kabupaten Banjarnegara	√	√
	Jawa Tengah	2	Kabupaten Banyumas	√	
	Jawa Tengah	3	Kabupaten Batang	√	√
	Jawa Tengah	4	Kabupaten Blora	√	
	Jawa Tengah	5	Kabupaten Boyolali	√	√
	Jawa Tengah	6	Kabupaten Brebes	√	

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
	Jawa Tengah	7	Kabupaten Cilacap	√	√
	Jawa Tengah	8	Kabupaten Demak	√	√
	Jawa Tengah	9	Kabupaten Grobogan	√	
	Jawa Tengah	10	Kabupaten Jepara	√	√
	Jawa Tengah	11	Kabupaten Karanganyar	√	√
	Jawa Tengah	12	Kabupaten Kebumen	√	√
	Jawa Tengah	13	Kabupaten Kendal	√	
	Jawa Tengah	14	Kabupaten Klaten	√	√
	Jawa Tengah	15	Kabupaten Kudus		
	Jawa Tengah	16	Kabupaten Magelang		
	Jawa Tengah	17	Kabupaten Pati		
	Jawa Tengah	18	Kabupaten Pekalongan	√	√
	Jawa Tengah	19	Kabupaten Pemalang	√	√
	Jawa Tengah	20	Kabupaten Purbalingga	√	√
	Jawa Tengah	21	Kabupaten Purworejo	√	√
	Jawa Tengah	22	Kabupaten Rembang		
	Jawa Tengah	23	Kabupaten Semarang	√	√
	Jawa Tengah	24	Kabupaten Sragen	√	
	Jawa Tengah	25	Kabupaten Sukoharjo		

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
	Jawa Tengah	26	Kabupaten Tegal	√	√
	Jawa Tengah	27	Kabupaten Temanggung		
	Jawa Tengah	28	Kabupaten Wonogiri	√	√
	Jawa Tengah	29	Kabupaten Wonosobo	√	√
	Jawa Tengah	30	Kota Magelang		
	Jawa Tengah	31	Kota Pekalongan	√	√
	Jawa Tengah	32	Kota Salatiga	√	
	Jawa Tengah	33	Kota Semarang	√	√
	Jawa Tengah	34	Kota Surakarta	√	
	Jawa Tengah	35	Kota Tegal		
25	Sumatera Barat	1	Kepulauan Mentawai	√	√
	Sumatera Barat	2	Pesisir Selatan		
	Sumatera Barat	3	Solok		
	Sumatera Barat	4	Sijunjung	√	√
	Sumatera Barat	5	Tanah Datar		
	Sumatera Barat	6	Padang Pariaman	√	√
	Sumatera Barat	7	Agam		
	Sumatera Barat	8	Lima Puluh Kota		
	Sumatera Barat	9	Pasaman	√	

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
	Sumatera Barat	10	Solok Selatan		
	Sumatera Barat	11	Dharmasraya	√	√
	Sumatera Barat	12	Pasaman Barat		
	Sumatera Barat	13	Kota Padang	√	√
	Sumatera Barat	14	Kota Solok	√	√
	Sumatera Barat	15	Kota Sawah Lunto	√	
	Sumatera Barat	16	Kota Padang Panjang	√	√
	Sumatera Barat	17	Kota Bukittinggi		
	Sumatera Barat	18	Kota Payakumbuh		
	Sumatera Barat	19	Kota Pariaman	√	√
26	Nusa Tenggara Barat	1	Lombok Barat	√	
	Nusa Tenggara Barat	2	Lombok Tengah		
	Nusa Tenggara Barat	3	Lombok Timur		
	Nusa Tenggara Barat	4	Sumbawa		
	Nusa Tenggara Barat	5	Dompu		
	Nusa Tenggara Barat	6	Bima		
	Nusa Tenggara Barat	7	Sumbawa Barat		
	Nusa Tenggara Barat	8	Lombok Utara	√	
	Nusa Tenggara Barat	9	Kota Mataram		
	Nusa Tenggara Barat	10	Kota Bima		

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
27	Sulawesi Barat	1	Majene		
	Sulawesi Barat	2	Polewali Mandar		
	Sulawesi Barat	3	Mamasa		
	Sulawesi Barat	4	Mamuju		
	Sulawesi Barat	5	Kabupaten Pasangkayu		
	Sulawesi Barat	6	Mamuju Tengah		
28	Jambi	1	Kerinci	√	
	Jambi	2	Merangin		
	Jambi	3	Sarolangun		
	Jambi	4	Batang Hari		
	Jambi	5	Muaro Jambi		
	Jambi	6	Tanjung Jabung Timur		
	Jambi	7	Tanjung Jabung Barat		
	Jambi	8	Tebo		
	Jambi	9	Bungo		
	Jambi	10	Kota Jambi		
	Jambi	11	Kota Sungai Penuh	√	√
29	Aceh	1	Simeulue		
	Aceh	2	Aceh Singkil		

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
	Aceh	3	Aceh Selatan		
	Aceh	4	Aceh Tenggara		
	Aceh	5	Aceh Timur		
	Aceh	6	Aceh Tengah		
	Aceh	7	Aceh Barat	√	√
	Aceh	8	Aceh Besar		
	Aceh	9	Pidie	√	√
	Aceh	10	Bireuen		
	Aceh	11	Aceh Utara		
	Aceh	12	Aceh Barat Daya		
	Aceh	13	Gayo Lues		
	Aceh	14	Aceh Tamiang		
	Aceh	15	Nagan Raya		
	Aceh	16	Aceh Jaya		
	Aceh	17	Bener Meriah		
	Aceh	18	Pidie Jaya		
	Aceh	19	Kota Banda Aceh		
	Aceh	20	Kota Sabang		
	Aceh	21	Kota Langsa	√	
	Aceh	22	Kota Lhokseumawe		

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
	Aceh	23	Kota Subulussalam		
30	Banten	1	Pandeglang	√	√
	Banten	2	Lebak	√	
	Banten	3	Tangerang	√	
	Banten	4	Serang	√	
	Banten	5	Kota Tangerang	√	√
	Banten	6	Kota Cilegon	√	
	Banten	7	Kota Serang	√	
	Banten	8	Kota Tangerang Selatan	√	
31	Gorontalo	1	Boalemo	√	√
	Gorontalo	2	Gorontalo	√	√
	Gorontalo	3	Pohuwato	√	√
	Gorontalo	4	Bone Bolango	√	
	Gorontalo	5	Gorontalo Utara		
	Gorontalo	6	Kota Gorontalo	√	
32	Maluku	1	Maluku Tenggara Barat		
	Maluku	2	Maluku Kepulauan Tanimbar	√	
	Maluku	3	Maluku Tengah		
	Maluku	4	Buru	√	

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
	Maluku	5	Kepulauan Aru	√	
	Maluku	6	Seram Bagian Barat		
	Maluku	7	Seram Bagian Timur		
	Maluku	8	Maluku Barat Daya		
	Maluku	9	Buru Selatan	√	
	Maluku	10	Kota Ambon	√	
	Maluku	11	Kota Tual		
33	Riau	1	Kuantan Singingi		
	Riau	2	Indragiri Hulu		
	Riau	3	Indragiri Hilir		
	Riau	4	Pelalawan	√	
	Riau	5	Siak	√	√
	Riau	6	Kampar	√	√
	Riau	7	Rokan Hulu	√	√
	Riau	8	Bengkalis	√	
	Riau	9	Rokan Hilir	√	
	Riau	10	Kepulauan Meranti		
	Riau	11	Kota Pekanbaru	√	√
	Riau	12	Kota Dumai	√	
34	Sulawesi Tengah	1	Banggai Kepulauan	√	

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/KOTA	
				PERDA KABUPATEN/ KOTA BANTUAN HUKUM	PERATURAN BUPATI/ PERATURAN WALIKOTA BANTUAN HUKUM
	Sulawesi Tengah	2	Banggai	√	
	Sulawesi Tengah	3	Morowali	√	
	Sulawesi Tengah	4	Poso		
	Sulawesi Tengah	5	Donggala		
	Sulawesi Tengah	6	Toli-Toli	√	
	Sulawesi Tengah	7	Buol	√	
	Sulawesi Tengah	8	Parigi Moutong		
	Sulawesi Tengah	9	Tojo Una-Una	√	
	Sulawesi Tengah	10	Sigi		
	Sulawesi Tengah	11	Banggai Laut		
	Sulawesi Tengah	12	Morowali Utara		
	Sulawesi Tengah	13	Kota Palu	√	
Jumlah Kab/Kota				212	91

**PAGU ANGGARAN DAN VOLUME BANTUAN HUKUM DI WILAYAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	PROVINSI	LITIGASI		NON LITIGASI		TOTAL
		ANGGARAN	VOL.	ANGGARAN	VOL.	
1	ACEH	1,896,000,000	237	352,110,000	33	2,248,110,000
2	BALI	432,000,000	54	64,020,000	6	496,020,000
3	BANTEN	1,416,000,000	177	245,410,000	23	1,661,410,000
4	BENGGULU	1,112,000,000	139	224,070,000	21	1,336,070,000
5	YOGYAKARTA	1,888,000,000	236	330,810,000	31	2,218,810,000
6	DKI JAKARTA	4,216,000,000	527	832,260,000	78	5,048,260,000
7	GORONTALO	504,000,000	63	74,690,000	7	578,690,000
8	JAMBI	1,296,000,000	162	245,410,000	23	1,541,410,000
9	JAWA BARAT	4,344,000,000	543	821,590,000	77	5,165,590,000
10	JAWA TENGAH	4,696,000,000	587	778,910,000	73	5,474,910,000
11	JAWA TIMUR	5,552,000,000	694	1,024,320,000	96	6,576,320,000
12	KALIMANTAN BARAT	360,000,000	45	53,350,000	5	413,350,000
13	KALIMANTAN SELATAN	144,000,000	18	21,340,000	2	165,340,000
14.	KALIMANTAN TENGAH	432,000,000	54	64,020,000	6	496,020,000
15.	KALIMANTAN TIMUR	1,320,000,000	165	213,400,000	20	1,533,400,000
16.	KEP. BANGKA BELITUNG	432,000,000	54	64,020,000	6	496,020,000
17.	KEPULAUAN RIAU	432,000,000	54	64,020,000	6	496,020,000
18.	LAMPUNG	1,224,000,000	153	181,390,000	17	1,405,390,000
19.	MALUKU	456,000,000	57	85,360,000	8	541,360,000
20.	MALUKU UTARA	504,000,000	63	74,690,000	7	578,690,000
21.	NTB	1,832,000,000	229	330,770,000	31	2,162,770,000
22.	NTT	504,000,000	63	74,690,000	7	578,690,000

NO	PROVINSI	LITIGASI		NON LITIGASI		TOTAL
		ANGGARAN	VOL.	ANGGARAN	VOL.	
23.	PAPUA	144,000,000	18	21,340,000	2	165,340,000
24.	PAPUA BARAT	360,000,000	45	53,350,000	5	413,350,000
25.	RIAU	912,000,000	114	170,720,000	16	1,082,720,000
26.	SULAWESI BARAT	384,000,000	48	74,690,000	7	458,690,000
27.	SULAWESI SELATAN	1,736,000,000	217	298,760,000	28	2,034,760,000
28.	SULAWESI TENGAH	1,056,000,000	132	192,060,000	18	1,248,060,000
29.	SULAWESI TENGGARA	1,104,000,000	138	181,390,000	17	1,285,390,000
30.	SULAWESI UTARA	528,000,000	66	96,030,000	9	624,030,000
31.	SUMATERA BARAT	576,000,000	72	85,360,000	8	661,360,000
32.	SUMATERA SELATAN	1,016,000,000	127	192,060,000	18	1,208,060,000
33.	SUMATERA UTARA	2,784,000,000	348	501,490,000	47	3,285,490,000
TOTAL		45,592,000,000	5,699	8,087,900,000	758	53,679,900,000

PAGU ANGGARAN BANTUAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Provinsi	Litigasi	Nonlitigasi
1.	Aceh	1,183,000,000.00	251,280,000.00
2.	Bali	357,000,000.00	62,820,000.00
3.	Banten	954,000,000.00	219,870,000.00
4.	Bengkulu	616,000,000.00	136,110,000.00
5.	DKI Jakarta	2,170,000,000.00	429,270,000.00
6.	Gorontalo	420,000,000.00	104,700,000.00
7.	Jambi	819,000,000.00	177,990,000.00
8.	Jawa Barat	2,576,000,000.00	492,090,000.00
9.	Jawa tengah	2,758,000,000.00	628,200,000.00
10.	Jawa Timur	3,451,000,000.00	680,550,000.00
11.	Kalimantan Barat	210,000,000.00	52,350,000.00
12.	Kalimantan Selatan	329,000,000.00	73,290,000.00
13.	Kalimantan Tengah	378,000,000.00	94,230,000.00
14.	Kalimantan Timur	833,000,000.00	202,460,000.00
15.	Kep. Bangka Belitung	336,000,000.00	83,760,000.00
16.	Lampung	924,000,000.00	230,340,000.00
17.	Maluku	329,000,000.00	73,290,000.00

No.	Provinsi	Litigasi	Nonlitigasi
18.	Maluku Utara	448,000,000.00	94,230,000.00
19.	NTB	910,000,000.00	188,460,000.00
20.	NTT	630,000,000.00	157,050,000.00
21.	Papua	252,000,000.00	62,820,000.00
22.	Papua Barat	210,000,000.00	52,350,000.00
23.	Riau	658,000,000.00	146,580,000.00
24.	Kepulauan Riau	294,000,000.00	73,290,000.00
25.	Sulawesi Barat	287,000,000.00	62,820,000.00
26.	Sulawesi Selatan	1,568,000,000.00	314,100,000.00
27.	Sulawesi Tengah	742,000,000.00	167,520,000.00
28.	Sulawesi Tenggara	749,000,000.00	177,990,000.00
29.	Sulawesi Utara	413,000,000.00	94,230,000.00
30.	Sumatera Barat	539,000,000.00	125,640,000.00
31.	Sumatera Selatan	665,000,000.00	136,110,000.00
32.	Sumatera Utara	1,883,000,000.00	387,390,000.00
33.	Yogyakarta	1,029,000,000.00	230,340,000.00
Total		29,920,000,000	6,463,520,000